

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU STANDAR PENILAIAN**Ilta Delastri¹, Ansori², Jamrizal³**^{1,2,3}Universitas Islam Batang Hariiltaw667@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peningkatan mutu standar pendidikan dengan analisis deskriptif kualitatif melalui research library. Hasil penelitian ini diketahui bahwa mutu Pendidikan Indonesia Evolusi praktik pendidikan dengan tujuan memberdayakan siswa dengan pengetahuan yang diarahkan sendiri dan menunjukkan serta memperkuat standar, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, mengajar anak muda untuk belajar keras dan memajukan pemahaman ilmiah melalui pendidikan formal merupakan tanggung jawab negara yang penting dan mulia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Mutu Pendidikan, Sekolah, Standar**Abstract**

This research aims to evaluate improvements in the quality of educational standards using qualitative descriptive analysis through a research library. The results of this research show that the quality of Indonesian education is an evolution of educational practices with the aim of empowering students with self-directed knowledge and demonstrating and strengthening the standards, ethics and values of society. This means that teaching young people to study hard and advancing scientific understanding through formal education is an important and noble responsibility of the state. This research uses secondary data collected from various sources and journals related to the title of this research.

Keywords: Policies, Education Quality, Schools, Standards.

PENDAHULUAN

Menurut Musfah (2015), pendidikan merupakan aspek terpenting dalam membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan juga dipandang sebagai salah satu cara suatu negara untuk menumbuhkan warga negara yang loyal, terhormat, dan berilmu. Tingkat pendidikan seseorang merupakan indikasi yang baik dari karakternya. Kuat atau lemahnya sistem pendidikan suatu negara akan tercermin pada karakter dan tingkat kecerdasan warga negaranya, yang pada gilirannya akan tercermin pada tingkat pembangunan negara secara keseluruhan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas sistem pendidikannya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya tersebut meliputi pembuatan kurikulum nasional dan daerah, pelatihan dan pendidikan guru agar lebih kompeten, pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar lainnya, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi guru, dan peningkatan kualitas administrasi sekolah. Namun, belum ada tanda-tanda peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dari berbagai inisiatif tersebut.

Salah satunya adalah bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari kualitas hidup yang lebih tinggi melalui pendidikan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha yang terencana dan terorganisasi untuk membina lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, dengan tujuan membantu peserta didik agar secara aktif mengembangkan kemampuan spiritual, keagamaan, kepribadian, intelektual, moral, dan keterampilan yang diperlukan untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengalihkan penyelenggaraan pendidikan dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat ke manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan tugasnya, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama secara erat dalam gagasan ini. Dalam hal ini, sekolah harus mampu memahami gambaran besar kebijakan pendidikan dan lingkungannya sendiri (pro dan kontra). Kemudian, dalam proses perencanaan, sekolah perlu menjabarkan gagasan tersebut menjadi kebijakan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola—program prioritas—yang dapat dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan tujuan dan Sasarannya sendiri. Setiap sekolah harus menetapkan sasaran mutu untuk setiap periode, membuat strategi untuk mencapai sasaran tersebut, melaksanakan rencana tersebut, menilai kemajuan mereka, dan kemudian menetapkan sasaran baru untuk tahun berikutnya.

Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tinggi sehingga negara dapat mencapai tujuan pendidikannya. Dalam bidang pendidikan, isu-isu tentang pemerataan, penerapan, dan mutu pengajaran merupakan tantangan yang terus ada. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia memerlukan pertimbangan yang matang, yang didasari oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya untuk meningkatkan hal ini telah lama diakui; upaya tersebut dilakukan dengan nama jaminan mutu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dengan memastikan pelanggan merasa senang saat mereka terlibat dalam pertukaran pendidikan.

Setiap langkah dalam proses pendidikan saling terkait dan membantu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Masukan, proses, hasil pembelajaran, dan manfaat merupakan lima area utama yang perlu diperiksa dan dinilai saat menciptakan mutu. Siswa, faktor lingkungan, dan status sosial ekonomi merupakan masukan yang dimaksud di sini. Untuk memastikan bahwa siswa lulus dengan keyakinan moral yang kuat di samping kemampuan kognitif yang kuat, para pendidik memberikan penekanan yang sama pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa dengan kompas moral yang kuat.

Pimpinan dalam administrasi sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi semua sumber daya sekolah dan memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan yang terkait dengan sekolah dilaksanakan secara metodis dan profesional. Hal ini, pada gilirannya, memengaruhi kualitas pengajaran. Untuk mengukur kualitas layanan pendidikan ini, pemerintah telah menetapkan standar pendidikan nasional (SNP). Proklamasi No. 32 Tahun 2013 menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi keunggulan sekolah.

Untuk mengukur dan mengantisipasi kesiapan lembaga pendidikan, sangat penting untuk menyertakan penelitian ilmiah yang menggunakan sistem manajemen mutu sebagai sarana pelaksanaan program penjaminan mutu. Mengembangkan metode pengajaran atau administrasi sekolah yang efisien dan berhasil merupakan salah satu langkah menuju tercapainya pendidikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang cukup dan berkualitas tinggi.

Seberapa baik semua sumber daya sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan merupakan ukuran kualitas sekolah. Kualitas sekolah ditentukan oleh efektivitas kumulatif sumber daya yang saling bergantung, yang meliputi administrasi, guru, staf pendukung, siswa, dan komite.

Dalam menyelesaikan kegiatan peningkatan mutu Pendidikan mutu standar penilaian maka diharapkan kepada satuan lembaga melakukan dan menerapkan berbagai kebijakan seperti perencanaan kegiatan dan sistematis kegiatan tersebut berjalan. Tugas dan peran kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar. Sekolah harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu standar penilaian.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program kebijakan sekolah dalam peningkatan mutu standar penilaian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan satu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi program kebijakan sekolah dalam peningkatan mutu standar penilaian?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana implementasi program kebijakan sekolah dalam peningkatan mutu standar penilaian

LANDASAN TEORI**Landasan Teori****Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)**

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2002), manajemen peningkatan kualitas berbasis sekolah adalah cara menjalankan berbagai hal yang memberi sekolah lebih banyak kebebasan dan adaptabilitas sekaligus melibatkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk orang tua, siswa, fakultas, dan staf, serta tokoh masyarakat, ilmuwan, wirausahawan, dan pihak berkepentingan lainnya, untuk bekerja sama menjadikan sekolah lebih baik sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berikut penjelasan Budi Raharjo yang lebih rinci tentang apa itu manajemen berbasis sekolah: a. Sekolah menjadi lebih mandiri ketika mereka diberi lebih banyak kebebasan untuk membuat keputusan tentang operasi mereka sendiri. b. Lebih banyak wewenang diberikan kepada sekolah sehingga mereka dapat menyesuaikan program mereka dengan kekuatan dan bidang kebutuhan mereka sendiri. c. Warga sekolah akan merasa lebih berkomitmen terhadap sekolah mereka dan lebih bangga dengan pekerjaan mereka jika mereka terlibat dalam pengambilan keputusan bersama (Budi Raharjo, 2003: 5).

Konsep Dasar MPMBS

Menurut Deepdiknas (2002: 10), elemen kunci MPMBS adalah otonomi sekolah, fleksibilitas, dan keterlibatan untuk mencapai tujuan mutu dalam pendidikan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing esensi MPMBS: a. Otonomi di dalam kelas dapat berarti kewenangan atau kemandirian, yang pertama mengacu pada kebebasan untuk memilih jadwal dan prioritas sendiri dan yang kedua untuk bertindak secara mandiri. Dengan demikian, otonomi sekolah adalah kekuatan sekolah untuk mengelola dan mengatur kepentingan

warganya sendiri sesuai dengan norma dan peraturan pendidikan nasional, berdasarkan ambisi warganya dan sesuai dengan inisiatif sekolah itu sendiri.

Untuk lebih spesifik, MPMBS berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong sekolah untuk lebih berinisiatif dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya mereka; mendorong keterlibatan masyarakat dan sekolah yang lebih besar dalam organisasi pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; membuat sekolah lebih bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam hal kualitas sekolah; dan mendorong persaingan yang sehat di antara sekolah dalam hal tingkat pendidikan yang diinginkan (Kementerian Pendidikan Nasional 2002:

Tahap-Tahap Pelaksanaan MPMBS

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan MPMBS: melakukan sosialisasi di kelas, membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, menentukan fungsi apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, melakukan analisis SWOT, melakukan curah pendapat untuk mencari solusi potensial atas permasalahan, mengembangkan dan mengimplementasikan program peningkatan mutu, dan terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program. Berikut ini adalah ikhtisar singkat dari setiap langkah dalam proses pengembangan sasaran mutu baru (Kementerian Pendidikan Nasional, 2002: 31-46):

- a. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa setiap orang yang tinggal di sekolah—guru, staf, siswa, dan komite sekolah—memahami dan memahami MPMBS, mengapa penting, dan bagaimana cara menerapkannya
- b. Sekolah yang menggunakan MPMBS diharuskan untuk mengembangkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan rencana mereka untuk masa mendatang. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan, visi, maksud, dan serangkaian sasaran merupakan bagian umum dari RPS.
- c. Mengidentifikasi Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Tujuan Sekolah
 1. Fungsi-fungsi berikut dipertaruhkan: proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, perencanaan dan evaluasi, sumber daya manusia, keuangan, layanan siswa, iklim akademik sekolah, hubungan sekolah-masyarakat, dan pengembangan fasilitas.
- d. Melakukan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) merupakan cara yang bagus untuk menilai seberapa baik setiap bagian sekolah dipersiapkan untuk mencapai tujuannya.

- e. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Alternatif
2. Berdasarkan temuan analisis SWOT, tahap selanjutnya adalah memilih langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang belum disiapkan menjadi fungsi yang sudah disiapkan. Mengambil langkah-langkah untuk mengubah fungsi yang belum disiapkan menjadi fungsi yang sudah siap diperlukan untuk mencapai tujuan.
- f. Administrator dan pemangku kepentingan sekolah lainnya menggunakan proses pemecahan masalah sebagai landasan untuk mengembangkan rencana dan inisiatif jangka pendek, menengah, dan panjang untuk peningkatan mutu. Harus ada skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang yang ditetapkan karena sekolah tidak selalu memiliki cukup uang untuk memenuhi semua tuntutan yang terkait dengan penerapan MPMBS.
- g. Sekolah harus mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah dicapai setelah berkonsultasi dengan orang tua dan anggota masyarakat.
- h. Sekolah hanya dapat mengetahui seberapa baik program MPMBS-nya berjalan jika sekolah memantau dan mengevaluasi implementasinya sepanjang tujuan jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Hasil penilaian ini akan membantu memandu peningkatan program di tahun-tahun mendatang dengan menyoroti kekuatannya dan area yang perlu ditingkatkan.
- i. Sasaran Mutu Baru untuk Tahun Berikutnya Temuan evaluasi dapat membantu keberhasilan program di masa mendatang, tetapi juga dapat membantu sekolah dan orang tua menetapkan sasaran mutu baru untuk tahun berikutnya. Jika hasilnya memuaskan, sasaran mutu dapat dinaikkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah,Puji Rahayu,Universitas Islam Nusantara	IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU	1. Sesuai dengan standar pengembangan perangkat pembelajaran untuk kurikulum mandiri, SDN 244 Guruminda di Kota Bandung telah merancang serangkaian sasaran

		PENDIDIKAN (2022)	pembelajaran dan diagram alir untuk mencapai sasaran tersebut; merancang asesmen diagnostik; membuat modul pengajaran untuk menyesuaikan instruksi dengan kebutuhan dan kemajuan unik setiap siswa; dan merencanakan asesmen formatif dan sumatif. 2. Asesmen diagnostik, pembelajaran sesuai modul pengajaran berbasis proyek (proyek jangka pendek dan jangka panjang), pembelajaran di kelas sesuai karakteristik siswa, dan asesmen formatif dan sumatif merupakan langkah awal dalam kurikulum mandiri yang telah diterapkan SDN 244 Guruminda, Kota Bandung. 3. Pengujian diagnostik, pemberian dan analisis penilaian formatif dan sumatif, serta pelaporan hasil pembelajaran merupakan bagian dari evaluasi implementasi kurikulum otonomi SDN 244 Guruminda Kota Bandung.
2.	Sudarajat AM	IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU	Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (School Self-

		<p>PENDIDIKAN (SPMP) DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH (2022)</p>	<p>Evaluation Activities/EDS) merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan mutu. Setelah itu, rencana pemenuhan, penerapan dan evaluasi mutu pendidikan, dan terakhir, penetapan standar untuk menggambarkan mutu sekolah secara akurat merupakan bagian dari proses tersebut. Untuk melaksanakan rencana dalam memastikan mutu pendidikan guna memenuhi delapan persyaratan Standar Nasional Pendidikan.</p>
3.	<p>Lailatul Azizah Silvia Witri</p>	<p>PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH (2021)</p>	<p>Dari penelitian tersebut di atas jelas bahwa penerapan TQM pada pelaksanaan program akreditasi unit pendidikan sangatlah penting. Peningkatan berkelanjutan, penetapan standar mutu, penerapan perubahan budaya dan organisasi, serta mempertahankan hubungan dengan pelanggan merupakan cara-cara di mana Total Quality Management (TQM) dapat meningkatkan mutu. Dengan upaya-upaya tersebut, pendidikan yang hebat dapat tercapai. Kualitas pendidikan</p>

			dapat ditingkatkan sejalan dengan perubahan masyarakat melalui penerapan praktik TQM yang baik ke dalam proses akreditasi.
--	--	--	--

METODE PENELITIAN

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data pada study ini adalah library research. Pengumpulan data menggunakan dilakukan dari berbagai sumber dengan menggunakan data sekunder dari literatur yang telah di publish.

Metode Analisis Data

Metode dalam studi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif., bertujuan untuk melihat gambaran program kebijakan sekolah dalam peningkatan mutu standar penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas seseorang untuk bekerja dan maju dalam pekerjaannya, serta tingkat profesionalisme dan daya saingnya, semuanya merupakan tujuan pendidikan formal. Evolusi praktik pendidikan dengan tujuan memberdayakan siswa dengan pengetahuan yang diarahkan sendiri dan menunjukkan serta memperkuat standar, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, mengajar anak muda untuk belajar keras dan memajukan pemahaman ilmiah melalui pendidikan formal merupakan tanggung jawab negara yang penting dan mulia.

Kapasitas untuk memahami guru dan menyampaikan temuan ilmiah kepada siswa dengan cara yang menginspirasi mereka untuk mengembangkan potensi mereka sendiri terkait erat dengan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah, yang pada gilirannya memerlukan kompetensi sosial, peningkatan pengetahuan profesional yang berkelanjutan, dan kapasitas untuk membina pendidik (Blaskova, et al., 2015).

Dalam industri jasa dan ekonomi secara umum, sektor pendidikan merupakan pemain utama. Namun, kini sudah terlambat untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan di bidang lain (Giannini, M. 2015). Ada saling pengertian antara pendidikan dan TQM. Dengan semakin populernya TQM sebagai sarana untuk menjamin pengajaran terbaik setiap saat (Karahen, M., & Mete, M. 2014). Untuk memastikan bahwa perekonomian negara dipasok oleh pekerja yang kompeten, gagasan tentang pendidikan berkualitas tinggi di sekolah telah menjadi yang terdepan dalam wacana publik.

Menyesuaikan strategi pengajaran untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu, meningkatkan tata ruang kelas, atau mengatur ulang lembaga pendidikan adalah cara-cara untuk meningkatkan kualitas penerapan dari waktu ke waktu. Mengidentifikasi masalah dan inisiatif yang muncul serta melatih pendidik baru untuk mengatasinya adalah hal yang sangat penting dalam konteks ini (Bazhenov, R., dkk., 2015). Istilah "manajemen kualitas total" identik dengan proses pendidikan. Di persimpangan antara manajemen mutu dan pendidikan terdapat tujuan untuk terus menawarkan pendidikan terbaik melalui penggunaan manajemen mutu yang komprehensif (Bagheri, J. 2016).

Istilah "manajemen mutu total" identik dengan proses pendidikan. Penilaian mutu dalam pendidikan harus didasarkan pada persyaratan sistem manajemen komunitas (Engkoswara dan Komariah 2010). Guru harus membangun hubungan berdasarkan kepedulian dan dukungan terhadap pembelajaran siswa. Mereka harus merencanakan dan melaksanakan pelajaran dengan cara yang memaksimalkan kesempatan siswa untuk belajar. Mereka harus menggunakan strategi untuk mengelola kelompok yang melibatkan siswa dalam pekerjaan akademis dan mengembangkan keterampilan sosial dan pengaturan diri mereka. Terakhir, mereka harus campur tangan bila perlu untuk membantu siswa yang memiliki masalah perilaku. (Seperti yang ditunjukkan Soetopo et al. (2010), mengemukakan, kapasitas lembaga pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah, yaitu; 1. Meningkatkan pemahaman, 2. Membuat tujuan akademis, 3. Keseimbangan antara independensi dan penyelesaian sengketa, 4. Memperbaiki proses kelompok, 5. Memecahkan masalah, 6. Membuat keputusan, 7. Mengevaluasi evolusi. Naluri dari seorang pemimpin diperlukan untuk memberdayakan sumber daya manusia, menurut Kasmir (2016). Latar belakang guru yang beragam dalam hal suku, budaya, agama, dan pendidikan membawa perspektif dan ide yang unik ke dalam kelas, oleh karena itu, keberhasilan suatu lembaga sekolah yang diatur oleh kepala sekolah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pada guru yaitu; 1). Memengaruhi, 2). Memotivasi, 3). Loyal, 4). Komitmen, 5). Kepuasan Kerja, 6). Kinerja, 7). Kesejahteraan.

Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran agar dapat mengajarkannya secara efektif di sekolah. Guru cenderung memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan ketika mereka diperlihatkan bahwa mereka memiliki kendali atas pekerjaan mereka, perasaan berhasil, dan bahwa pekerjaan mereka sulit (Oraman, dkk. 2011). Dengan menggunakan perencanaan sumber daya manusia yang strategis sebagai metode, lembaga pendidikan dapat memperlengkapi pendidik mereka dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka dan menerapkan kebijakan dan program mereka. Sejumlah elemen

eksternal, termasuk kendala ekonomi, kemajuan dan pengembangan teknis, undang-undang dan peraturan, dan iklim politik saat ini, memengaruhi lingkungan sekolah dan peran guru, yang terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Solidaritas guru berfungsi sebagai model bagi siswa untuk diikuti, baik mereka bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil, untuk mengurangi potensi ketidaknyamanan.

KESIMPULAN

Setiap langkah dalam proses pendidikan saling terkait dan membantu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Masukan, proses, hasil pembelajaran, dan manfaat merupakan lima area utama yang perlu diperiksa dan dinilai saat menciptakan mutu. Siswa, faktor lingkungan, dan status sosial ekonomi merupakan masukan yang dimaksud di sini. Untuk memastikan bahwa siswa lulus dengan keyakinan moral yang kuat di samping kemampuan kognitif yang kuat, para pendidik memberikan penekanan yang sama pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa dengan kompas moral yang kuat.

Pimpinan dalam administrasi sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi semua sumber daya sekolah dan memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan yang terkait dengan sekolah dilaksanakan secara metodis dan profesional. Hal ini, pada gilirannya, memengaruhi kualitas pengajaran. Untuk mengukur kualitas layanan pendidikan ini, pemerintah telah menetapkan standar pendidikan nasional (SNP). Proklamasi No. 32 Tahun 2013 menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi keunggulan sekolah.

Kapasitas untuk memahami guru dan menyampaikan temuan ilmiah kepada siswa dengan cara yang menginspirasi mereka untuk mengembangkan potensi mereka sendiri terkait erat dengan kapasitas untuk melakukan penelitian ilmiah, yang pada gilirannya memerlukan kompetensi sosial, peningkatan pengetahuan profesional yang berkelanjutan, dan kapasitas untuk membina pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Blaskova, M., Blasko, R., Figurska, I., & Sokol, A. (2015). Motivation and Development of the University Teachers' Motivational Competence. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 116–126. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.746>
- Blaskova M., Blaško, R., & Kucharcíková, A. (2014). Competences and Competence Model of University Teachers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 159, 457–467. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.40>. Development of Key Competences of

- University Teachers and Managers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 187–196. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.755>
- Bazhenov, R., Bazhenova, N., Khilchenko, L., 2015. Components of Education Quality Monitoring: Problems and Prospects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 214, 103–111. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.600>
- Bagheri, J. (2016). Overlaps between Human Resources' Strategic Planning and Strategic Management Tools in Public Organizations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230, 430–438. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.054>
- Engkoswara dan Komariah (2010). *Administrasi Pendidikan*. Penerbit Alfabeta Bandung
- Karahan, M., & Mete, M. (2014). Examination of Total Quality Management Practices in Higher Education in the Context of Quality Sufficiency. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1292–1297. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.627>
- Oraman, Yasemin, Gökhan Unakıtan, dan Ufuk Selen. (2011). “Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 24: 413–20.
- Soetopo Hendayat, 2010. *Perilaku organisasi, Teori dan Praktek di bidang Pendidikan*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung